

## **PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG BAIK**

**Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi**

### **Abstract**

The experience in attending lectures at college, the writer found a rare case in which a master degree student sitting farthest behind was fallen down her chair and suffered from *a stroke* since the lecturer forced her to translate an English study material into Indonesian for the presentation. This situation showed a violence at college because of the education system expelling the lecturer to apply things in order to achieve the goal of the study. However, the unready student to do so became the victim of violence at college so that she had to be *dropped out* owing to keep on being sick.

A senior 58 years old Biology subject lecturer, Bambang Subali, with 30 years teaching experience, but not having been participated in certificate program (DCPS) owing to the bad quota in certification system, moreover for having been taking his doctoral degree study, is a kind of violence at college as well. (Bambang Subali, *Sertifikasi, Harapan dan Kenyataan*, Dinamika, 2009:34). This study is going to express why the violence occurs in the educational world and how to cope with it.

**Key Word: violence in the educational world.**

### **Pendahuluan**

Adanya kemajuan di segala bidang, modernisasi, revolusi komunikasi, globalisasi, kemajuan IPTEKS (ilmu pengetahuan teknologi dan seni), ISO (*internasional standart organization*) menuntut manusia bekerja keras menyesuaikan dengan tuntutan dan jiwa jaman. Manusia yang tidak mau menyesuaikan tuntutan jaman akan tereliminasi oleh keadaan, sehingga manusia siap atau tidak siap harus mengikutinya. Akibatnya sudah dapat ditebak siapa saja yang tidak siap **jiwa, raga dan mentalnya** dalam menghadapinya akan terkena tekanan darah tinggi, *strok*, asam urat, serangan jantung, bahkan tidak sedikit yang mati muda (kurang 70 tahun), karena manusia dipaksa bekerja melampaui ambang batas kewajaran, bekerja lebih dari 8 jam per hari, bekerja dalam kondisi tertekan, bekerja model target. Sewaktu penulis masih menjadi dosen di FISE (Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi) UNY, jarang dosen-dosen di faktultas tersebut yang usianya sampai mencapai usia pensiun, karena volume pekerjaan yang banyak dan pola kerja, pola pikir, pola makan tidak ideal sehingga banyak yang mati muda. Hal di atas menurut hemat penulis adalah kekerasan di perguruan tinggi sehingga perlu adanya evaluasi secara holistik agar manusia bisa hidup ideal; sehat, bugar sampai usia lanjut dan sejahtera.

Secara historis kekerasan sudah ada sejak manusia menghuni planet bumi, kekerasan pertama dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habil karena iri hati, kekerasan terus berlangsung hingga penyalipan, pembunuhan Isa Almasih di awal abad pertama. Kekerasan terjadi dimana-mana, peperangan antar bangsa; Perang Dunia I, Perang Dunia ke II, Perang Kemerdekaan RI, bahkan sampai awal Abad 21 peperangan dan kekerasan masih berlangsung yang menimbulkan penderitaan dimana-mana. **Manusia tidak mau belajar sejarah, pada hal sejarah merupakan guru kehidupan,** supaya manusia tidak melakukan kesalahan atau kebodohan yang sama berbuat kekerasan terhadap sesamanya. Oleh karena hingga sampai saat ini masih berlangsung kekerasan seperti di Tailand Selatan, Filipina Selatan, India menghadapi Militan Kasmir, Pakistan menghadapi kelompok dukungan Al Qaida, Pasukan Koalisi Amerika melawan pendukung Saddam di Irak, Afganistan melawan Taliban, Somalia, Dafur (Afrika), Amerika Latin dan konflik antar etnis di Indonesia juga sering terjadi dan merupakan bahaya laten sebagai perwujudan kekerasan. Kejadian terakhir ketika berlangsungnya Pemilu 2009 terjadi kerusuhan dan kekerasan di Wamena, Papua Barat beberapa Polisi dan penduduk setempat meninggal akibat kekerasan (Metro TV, 17 April 2009).

Apa yang dilakukan Nordin M Top dkk. untuk mengebom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009 yang menyebabkan korban lebih 10 orang meninggal, merupakan produk kekerasan dialektika yang bersumber dari dunia pendidikan. Berlanjut dengan terbunuhnya Ibrahim tersangka teroris, Air Setyawan, Eka Joko Sarjono dari Solo yang ditembak oleh Densus 88 Anti teror semua bersumber pada budaya kekerasan produk dunia khususnya dunia pendidikan yang tidak mengakomodasikan nilai-nilai kasih terhadap sesama.

Kekerasan berlangsung di seluruh dunia, dampak globalisasi dan modernisasi memberi kontribusi terhadap perkembangan kekerasan yang dilakukan manusia. Bahkan perkembangan dari masyarakat nomaden, petani, industri, hingga ke masyarakat zaman revolusi komunikasi telah menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas kekerasan. Adanya perkembangan media cetak, media elektornika, secara tidak langsung telah mempertontonkan budaya kekerasan, pornografi, film-film tidak mendidik seperti fiksi-fiksi; telah memberi kontribusi terhadap kekerasan dalam pendidikan.

Kekerasan sepertinya sudah mendarah daging, khususnya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sebagaimana dalam penerimaan mahasiswa baru diperlakukan dengan tidak manusiawi disertai kekerasan berupa bentakan dan cacian oleh seniornya. Sebagai senior, yang disebut sebagai Komite Disiplin membentak juniornya, menyeret dari dalam kelas, meyuruh *pus up*, menggebrak pintu dan jendela sembari membentak-bentak orang disekitarnya (Google, Anti Kekerasan, 2009). Kekerasan merupakan gambaran dalam pendidikan pada umumnya, baik dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap junior dan dosen terhadap mahasiswanya, atau sebaliknya; dosen merasa risih ditekan mahasiswanya dan tidak dihormati (Prayitno, 20 Juli 2009), sehingga lengkaplah kekerasan yang masif.

Kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan banyak dosen menganggap hal yang wajar, pada hal mereka seharusnya tahu bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan tidak ada manfaatnya, bahkan justru menambah penderitaan bagi peserta didik. Dosen pernah menjadi mahasiswa dan pernah diperlakukan secara keras sewaktu di bangku kuliah, sehingga merupakan pengulangan yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Beberapa dosen telah melakukan kekerasan terhadap mahasiswanya dengan memarahi melampaui ambang batas, sehingga sangat mempengaruhi secara psikologis terhadap peserta didik.

Kekerasan-kekerasan dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, seolah-olah menjadi hal biasa; seperti diungkapkan oleh Sudiman mantan mahasiswa IKIP PGRI Yogyakarta, meskipun sudah mengulang 3 kali tetapi nilainya tetap D, karena ada masalah bukan akademis yang dilakukan dosen yang tampil arogan dan sangar. Hal ini menandakan bahwa masyarakat kita sedang sakit karena tekanan-tekanan ekonomi dan masalah-masalah yang kompleks sehingga masyarakat mengalami gangguan jiwa (Sandra, TV 7, Senin 6 April 2009)

### **Pengertian Kekerasan**

Secara umum pengertian kekerasan didefinisikan suatu tindakan yang dilakukan suatu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Kekerasan adalah kekerasan terhadap individu yang sedang belajar, termasuk yang ada di dalam binaannya. Perlakuan tindakan semena-mena terhadap peserta didik oleh seseorang yang seharusnya menjaga atau melindungi (*care taker*) pada mahasiswanya. Kekerasan biasanya dilakukan pada mahasiswa, baik mental, emosi, sehingga menimbulkan

kemarahan dan sakit hati. Pelaku kekerasan pada umumnya bertindak sebagai pelindung, yang seharusnya memprotek terhadap peserta didik, dan kekerasan dilakukan oleh orang terdekat. Biasanya dilakukan oleh pejabat (atasan), dosen, karyawan, sesama teman, atau sistem, dan lingkungan budaya (Yayan Akkhyar, 2008: 1).

Kekerasan menurut Simon Fisher yang dikutip Neneng (2008; 1) "kekerasan adalah tindakan, perkataan, sikap berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, sosial, atau lingkungan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensi secara penuh." Saat ini kekerasan dalam kehidupan sehari-hari hampir diidentikkan dengan perkelahian, bentrokan fisik. Kekerasan bukan hanya berwujud perkelahian atau bentrokan fisik antar mahasiswa tetapi bisa diwujudkan dalam perkataan, tindakan, sikap manusia dapat dikategorikan kekerasan.

Menurut Igbal Djayadi, Sosolog UI yang dikutip Sumarsih (2008; 3) "Kekerasan secara umum dapat merujuk kepada tindakan untuk mengurangi atau meniadakan eksistensi manusia lain. Ada dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individual dan berorientasi sepenuhnya pada individu, dan secara umum jenis ini merujuk pada kriminalitas. Tercakup di dalamnya tindakan penganiayaan dan pembunuhan karakter, baik dilakukan untuk mengambil harta maupun nyawa orang lain. Kedua adalah kekerasan yang dilakukan secara kolektif, baik pelaku maupun orientasi hasilnya adalah kelompok bukan individu.

Kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan diterjemahkan tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau kerusakan fisik. Kekerasan adalah sebagai upaya seseorang atau kelompok untuk meniadakan atau menguasai kelompok lain terhadap seluruh hidupnya, dilakukan bertentangan dengan nilai moral dan norma hukum. Akibat tindakan kekerasan adalah seseorang atau kelompok, bisa kehilangan harta, kerusakan fisik (terluka dan cedera) atau kehilangan semuanya.

Kekerasan dalam pendidikan adalah kekerasan yang dilakukan pejabat, dosen terhadap mahasiswa dengan memanfaatkan kekuasaannya atau otoritasnya. Biasanya peserta didik ada dibawah kekuasaannya dan kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan mental, kesengsaraan, penganiayaan, maupun penganiayaan emosional. (Google, Kekerasan, 2008).

Kekerasan dalam **bidang pendidikan**, biasanya dilakukan dalam penerimaan mahasiswa baru. Dalam penerimaan mahasiswa baru dikenal dengan Ospek (Orientasi pengenalan lingkungan kampus), MOS (masa orientasi mahasiswa) atau dengan istilah semacam itu. MOS biasanya disertai dengan bentakan, pelecehan, penganiayaan senior terhadap junior. Penganiayaan senior terhadap mahasiswi junior juga terjadi bisa mengakibatkan kematian seperti yang terjadi di STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) maupun perguruan tinggi semi militer. Alasan dalam kekerasan ini adalah sebagai ajang balas dendam terhadap juniornya sebagai tradisi tahun sebelumnya, alasan lainpun dibuat untuk membenaran antara lain; menjalin kebersamaan, memupuk persaudaraan, kedisiplinan. Namun semua itu tidak ada korelasi antara tujuan dengan kejadian di lapangan.

Kekerasan berbau **SARA** (suku antar golongan ras dan agama) di perguruan tinggi berusaha untuk di nihilkan melalui pendidikan wawasan kebangsaan terintegrasi melalui pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan pendidikan agama yang inklusif. Menurut Gus Dur kekerasan agama akan selalu terjadi di Indonesia, selama warga negara Indonesia tidak mengakui adanya pluralisme dalam suku dan pendidikan agama. Ada kelompok tertentu menganggap dirinya paling benar dan melakukan kekerasan terhadap agama yang dianggap sesat. Kelompok Agama pelaku kekerasan, mereka tidak menyadari bahwa Bangsa Indonesia sudah berabad-abad yang lalu memiliki keragaman dalam agama yang dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika; berbeda-beda tetapi tetap satu jua (Gus Dur, 2008: 3).

Menurut Magnis Suseno; kekerasan dalam pendidikan dapat diminimalisir jika seluruh warga bangsa, menghargai sikap pluralisme dan multikultural yang merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sikap tersebut bukan impor dari luar tetapi merupakan kearifan bangsa yang sudah ada sejak dahulu. Magnis menyayangkan ada kelompok tertentu yang tidak setuju tentang konsep pluralisme dalam pendidikan agama sehingga menimbulkan kekerasan dalam pendidikan. Pada hal Sumpah Pemuda, Proklamasi mengandung nilai-nilai keberagaman dalam persatuan bangsa dan tidak menghendaki kekerasan agama karena negara melindungi segenap warganya.

Sedang menurut Mansur dosen UIN Yogyakarta, sudah saatnya mengevaluasi lagi kurikulum dan mengkonstruksi ulang pendidikan agama di perguruan tinggi agar tidak

menghasilkan kekerasan dalam pendidikan yang menghasilkan manusia santun menjadi berkat bagi semua umat manusia, bukan sebaliknya melahirkan teroris yang egois untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya (Munsur, Wawancara, 13 Agustus 2009).

### **Pendidikan Anti Kekerasan di Perguruan Tinggi**

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harafiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pematangan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis anti kekerasan (Istiqomah, 203: 7). Sedang hakekat Anti Kekerasan adalah mensosialisasikan nilai-nilai, norma-norma tingkah laku manusia yang harus dan wajib dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang mengedepan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian dan menghindari kekerasan.

Dalam mensosialisasikan nilai moral perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, *stakeholders* pendidikan Anti kekerasan, dan seluruh masyarakat. Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

“Pendidikan anti kekerasan adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperhensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan perguruan tinggi, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Pelatihan pendidikan anti kekerasan perlu diadakan bagi dosen-dosen, karyawan, mahasiswa, orang tua, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang mahasiswa yang terlibat dalam proses kehidupan yang utuh. Perhatian pendidikan anti kekerasan harus berlangsung cukup lama, dan pembelajaran anti kekerasan harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di perguruan tinggi dan masyarakat (Setyo Raharjo, 2002; 28).

Pendidikan Anti kekerasan harus direncanakan secara matang oleh *stakeholders*, sebagai *think-tank*, baik para pakar Anti kekerasan (Komnas HAM) seperti rohaniawan (tokoh agama), pemimpin non formal (tokoh masyarakat), dosen, mahasiswa, karyawan, orang tua mahasiswa. Pendidikan anti kekerasan ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan universal. Keberhasilan pendidikan anti kekerasan dengan keluaran

menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang moralis (anti kekerasan) dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (*good citizen*). Kesuksesan pendidikan Anti kekerasan tidak diukur dengan penguasaan nilai-nilai anti diskriminasi dan inklusifisme serta *soft skills* yaitu kemampuan bekerja kelompok secara **inklusif** (mudah menerima masukan) anti diskriminasi, egalitarian, memimpin secara demokratis, kemampuan berkoordinasi, humanis, menghargai pluralisme, kemampuan berkomunikasi, tabah dan gigih, percaya diri, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi, tidak banyak tuntutan dan memiliki nilai-nilai wawasan perdamaian untuk mewujudkan kehidupan anti kekerasan (Sofian, Kedaulatan Rakyat, 19 Agustus 2005). Nilai-nilai Anti kekerasan harus senantiasa dijunjung tinggi seperti konsep "*tepa sliro*" berimpati kepada orang lain yang menekankan kebersamaan dan keteladanan pemimpin dalam kehidupan anti kekerasan.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan pemimpin formal dan non formal bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang penuh perdamaian dan kasih sayang terhadap sesama yang diwujudkan baik dalam ranah organisasi negara (*state*), organisasi masyarakat (*civil state*), ranah istitusi dunia usaha (*market institution*). Semua pejabat negara, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab menjadikan jabatannya sebagai media pembelajaran pendidikan Anti kekerasan

Dalam mewujudkan kehidupan anti kekerasan untuk mewujudkan masyarakat sipil perlu strategi perjuangan secara struktural dan kultural secara bersama-sama. Strategi struktural dalam arti politik, perbaikan struktural ini merupakan sarana yang paling efektif adalah melalui partai politik. Melalau lembaga partai politik aspirasi masyarakat dapat disalurkan tentang pendidikan anti kekerasan akan diperjuangkan sebagai masukan dari infrastruktur politik kepada suprastuktur politik. Input dari infrastruktur politik kepada suprastruktur politik akan dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang yang mewajibkan dilaksanakannya pendidikan Anti Kekerasan bagi generasi penerus yang didukung dana dari pemerintah. Sementara secara kultural memerlukan perjuangan yang panjang. Perjuangan membangun mentalitas bangsa melalui nilai-nilai keadilan demokrasi dan mengandung nilai anti kekerasan, harus diawali dari individu yang mengutamakan kehidupan yang menjunjung nilai-nilai anti kekerasan, disemaikan dari

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat luas sebagai implementasi keteladanan anti kekerasan.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai Anti kekerasan diperlukan pemimpin atau pendekar, pejuang Anti kekerasan dalam pendidikan yang tidak pernah gentar, putus asa atau frustrasi meskipun rintangan, halangan, lingkungan tidak kondusif, dan harus berhadapan dengan kekuasaan yang cenderung menggunakan kekerasan. Dengan tidak jemu-jemu nya meneriakkan sosialisasi pendidikan Anti kekerasan untuk mewujudkan nilai anti kekerasan secara universal.

Pendekar pendidikan anti kekerasan *pertama*; **harus yakin sungguh-sungguh yakin atau se yakin-yakinnya (percaya sungguh-sungguh percaya)** bahwa nilai-nilai anti kekerasan **bisa dan harus disosialisasikan** dengan sungguh-sungguh pada peserta didik sehingga peserta didik mengerti dan melaksanakan nilai-nilai anti kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*; pemimpin (pendekar anti kekerasan) harus berfikir **sungguh-sungguh berfikir** tidak pernah putus asa dan kehilangan akal untuk mencari solusi dalam pendidikan anti kekerasan demi perbaikan moral peserta didik. *Ketiga*; pendekar anti kekerasan **harus berusaha sungguh berusaha** untuk mewujudkan **kehidupan anti kekerasan yang baik** dalam masyarakat. Pemimpin anti kekerasan harus bersedia bersinergis dengan pemimpin lain untuk mewujudkan kehidupan yang damai, baik dengan menggunakan konsep *gold three angle* yaitu kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah dan penyandang dana. Perguruan tinggi mengadakan R dan D (*research & development*) dalam bidang pendidikan anti kekerasan yang telah diuji cobakan dan berhasil. Pemerintah termasuk pemimpin nasional yang memberi *good will* (kemudahan) melalui peraturan pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan. Penyandang dana bisa dari *grand* (hadiah) atau donatur, hibah untuk mendanai riset dan sosialisasi nilai anti kekerasan sehingga pendidikan anti kekerasan bisa berjalan dengan baik seperti harapan.

Hasil riset perguruan tinggi diharapkan menambah alternatif pemerintah yang dapat dipilih sebelum menentukan kebijakan dilaksanakan, selain itu tenaga dosen bersama mahasiswa dapat mendampingi masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa khususnya dalam memecahkan **persoalan anti kekerasan dalam kehidupan berbangsa**. Mereka bisa bersinergis dan



tidak saling menyalahkan, pakar-pakar perguruan tinggi dapat memberi masukan pada pemerintah dan sekaligus terjun langsung ke masyarakat dengan langkah kongkrit untuk memperbaiki kehidupan bangsa dalam mewujudkan anti kekerasan (Victor Purba, Kompas; Kamis, 22 Maret 2007; 12).

Jadi nilai anti kekerasan harus dibawa seorang pakar anti kekerasan yang meyakini kebenaran perdamaian sebagai ideologi ideal harus ditanamkan pada setiap hati (personal, individu) agar suatu hari nanti kehidupan bangsa yang anti kekerasan pasti terwujud.

Dengan adanya benih nilai-nilai anti kekerasan yang sudah disemaikan dalam keluarga, diajarkan di sekolah oleh dosen dan masyarakat diharapkan setiap personal dapat mempraktikkan nilai perdamaian (anti kekerasan), kasih terhadap sesama dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal nilai perdamaian dan kasih yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi generasi penerus untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*). Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan perdamaian (anti kekerasan) dapat dimanfaatkan konsep *learning to do, learning to be, learning to know, learning to live together*. Pengertiannya dalam pembelajaran anti kekerasan mahasiswa diajak melakukan bersama-sama, pendidikan merupakan proses menjadi dewasa, sempurna sesuai dengan tujuannya, pendidikan anti kekerasan dilaksanakan saat ini, dan pendidikan anti kekerasan dilakukan bersama-sama dalam kehidupan masyarakat sehingga pendidikan antara di kampus, rumah dan masyarakat saling mendukung untuk membentuk kehidupan yang lebih damai (anti kekerasan). Apalagi dosen, orang tua mahasiswa, pemuka agama, pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat (pemimpin nasional) memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang anti kekerasan dengan konsep “*Ingarso sung tuladho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*” artinya seorang pemimpin yang baik bisa memberi keteladanan atau menjadi panutan bagi yang dipimpinnya, ditengah-tengah lingkungannya menjadi penggerak untuk mencapai tujuan, sedang jika dibelakang memberi dorongan, petunjuk atau memberi motivasi bagi yang dipimpinnya sehingga sasarannya dapat dicapai. Konsep pendidikan anti kekerasan di atas tidak hanya sebagai wacana tetapi harus diaktualisasikan ke dalam

kehidupan nyata, sehingga pendidikan anti kekerasan bisa mewujudkan masyarakat sipil yang dicita-citakan.

### **Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Mahasiswa S-1 PGSD**

Tujuan Pendidikan di PGSD diharapkan mampu mencerminkan sosok calon guru SD/MI yang dikelompokkan ke dalam rumpun kompetensi yang mencakup; (1) pengenalan peserta didik secara mendalam, (2) Penguasaan bidang studi (3) Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan (3) pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Keempat kompetensi tersebut merupakan dasar ilmiah seni mengajar apabila diterapkan dalam kondisi ontentik di sekolah akan memungkinkan dikuasainya kompetensi profesional seorang guru yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian (Dirjen Dikti 2009: 1).

Menurut almarhum Prof. Sugeng mardiyono, Phd., UU RI Indonesia No. 14 Tahun 2005, pasal 8 dan 9, tentang guru SD wajib memiliki kualifikasi sarjana, memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, serta sertifikat pendidik (Sugeng Mardiyono, 2006; 1). Guru SD yang profesional harus menguasai ilmu pengetahuan yang memayungi seluruh mata pelajaran yang harus diajarkan, dasamping memiliki ketrampilan mengajar. Tilaar (1988) menyatakan bahwa profil guru abad 21 adalah guru yang mempunyai dasar pengetahuan yang kokoh, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, mempunyai ketrampilan dalam membangkitkan motivasi peserta didik, dan serius memperhatikan pengembangan presesi yang berkesinambungan (Dirjen Dikti 2009: 1).

Peran Dosen dalam usaha mencapai tujuan di atas adalah dengan membimbing, mendampingi mahasiswa PGSD menjadi teman sekerja dalam memahami materi pelajaran sekaligus mendewasakan peserta didik untuk menguasai materi yang direncanakan oleh kurikulum. Tugas dan tanggung jawab dosen sebagaimana diketahui merupakan tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Dosen adalah seorang yang mempunyai kompetensi berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar. Dosen sebagai pejabat fungsional dengan tugas utamanya adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat (Keputusan Nomor 38/Kep./MK WASPAN/8/1999).

Tugas dosen di bidang pendidikan dan pengajaran adalah dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai sumber kepada mahasiswa. Kegiatan mentransfer ilmu ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dosen dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disajikan dengan baik. Dalam kegiatan menyampaikan informasi harus dilakukan penyaringan disesuaikan dengan moral, etika yang berlaku secara umum di masyarakat. Oleh karena itu dosen harus mempunyai semangat kerja yang tinggi, terbuka, progresif, inovatif sehingga materi yang disajikan tetap *up to date* tidak ketinggalan jaman (Winarni, 2006: 1).

Dalam usaha mewujudkan tujuan di atas, implementasinya terjadi kekerasan dalam pendidikan; ada beberapa kekerasan yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa, hal ini terjadi karena mahasiswa didudukkan sebagai sub ordinat, mahasiswa hanya sebagai obyek penderita. Pembelajaran didesain seolah-olah mahasiswa bagaikan tabung yang hanya diisi oleh dosen tanpa hak menghindar atau tidak terjadi dialog yang seimbang. Model pembelajaran di atas mengakibatkan kekerasan dalam pendidikan jika tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kekerasan dosen terhadap mahasiswa dengan memaksa mahasiswa mengerjakan tugas di atas kewajiban, memberi waktu terlalu singkat, memberi nilai terlalu pelit dan tidak mengeluarkan nilai tepat pada waktunya.

Praktik kekerasan dalam pendidikan juga terjadi yang diakibatkan oleh sistem yang didesain oleh lembaga, semua digunakan model target untuk memenuhi ISO (*internasional standart organization*). Koreksi hasil ujian mahasiswa dan pengeluaran nilai diberi waktu 1 minggu, dosen harus mengajar 16 kali tatap muka dan *e-learning* hanya sebagai tambahan. Model pembelajaran di atas mengakibatkan dosen tergesa-gesa dan kurang teliti, karena juga dipaksa untuk memberi nilai minimal B, supaya pembelajaran dianggap berhasil. Jika dosen tidak sesuai dengan norma yang berlaku umum dianggap *killer*, (sebagaimana dalam novel *Cintaku di Kampus Biru* karangan Ashadi Siregar) digunjingkan teman sekerja, diintervensi oleh atasan. Akibatnya pembelajaran hanya berlangsung legal formal tanpa memperhatikan program, proses, hasil, sebagaimana dalam konsep *Aplaid Aproach* atau evaluasi terhadap program, hasil dan evaluasi sendiri.

Kekerasan di dunia perguruan tinggi menyangkut hak cuti bagi dosen wanita, ada dosen yang sudah punya anak lebih dari 2 orang, ketika mempunyai anak ke 3 tidak

diberi kesempatan untuk cuti, bentuk kekerasan yang lain ada dosen yang dalam kondisi sakit dipaksa untuk bekerja seperti almahum Terbit Suasono, sehingga meninggal di usia muda, ada juga dosen yang kena *strok*, sakit jantung, asam urat yang seharusnya masih istirahat namun peraturan memaksa dosen harus mengajar, bekerja lembur, hal ini pun merupakan bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan. Banyak dosen yang lebih 8 tahun tidak naik pangkat, karena harus mengajar tiap semester termasuk semester pendek tidak diberi kesempatan untuk menyisihkan waktu penelitian dan menulis artikel sehingga kenaikan pangkatnya tertunda. Dosen dan karyawan tidak dihargai sebagai mana mestinya dalam menjaga ujian semesteran, honor yang ditunda semua ini bentuk kekerasan yang dilakukan lembaga di dunia pendidikan.

Keberhasilan pendidikan anti kekerasan di China patut kita tiru. Pendidikan anti kekerasan di China berbeda dengan pendidikan di Indonesia yang lebih menekankan pada karakter akhlak (**implementasi anti kekerasan**) melalui proses *knowing the good, loving the good, and acting the good*, yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan aspek fisik, sehingga menghasilkan akhlak mulia (moral yang baik anti kekerasan) bisa terukir menjadi *habit of the mind, habit of the hart, habit of the hands* (Google Pendidikan Anti Kekerasan , 2007: 1). Pendidikan anti kekerasan memerlukan keterlibatan semua aspek kehidupan manusia, sehingga tidak cocok hanya menekankan pada aspek kognitif saja. Namun pendidikan anti kekerasan mahasiswa harus disesuaikan dengan perkembangan jiwanya, mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia; intelektual, karekater, estetika, dan fisik dan dalam koridor pembelajaran Anti kekerasan yang menyenangkan (Bobbi DePorter & Mike Hernacki, 2003: 8).

Dalam usaha mentarsfer nilai-nilai anti kekerasan dapat digunakan **pendekatan dan metode** pembelajaran yang tepat sesuai dengan pertumbuhan kejiwaan. Menurut Habibah (Habibah, 2007: 1) dalam sosialisasi pendidikan anti kekerasan dapat digunakan pendekatan **indoktrinasi, klasifikasi nilai, keteladanan, dan perilaku dosen**. Keempat pendekatan tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan situasi keondisi serta dilakukan secara holistik sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Pendekatan di atas juga diharapkan dosen mengetahui karakteristik mahaiswa maupun kondisi kelas, dan seorang dosen harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan psikologi pendidikan sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran Anti kekerasan.

Pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi hadiah atau hukuman, peringatan, dan pengendalian fisik. Sedang pendekatan klasifikasi nilai, dengan cara penalaran dan ketrampilan. Pendekatan keteladanan dengan cara disiplin, tanggung jawab, empati, dan pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku seperti berdoa, berterima kasih, mengasihi sesama, anti kekerasan. Pendekatan habitus diharapkan dapat merubah perilaku Anti kekerasan (Ambarwati, 2007: 1).

### **Penutup**

Kekerasan dalam pendidikan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan karena akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Perdamaian di dunia tidak akan terwujud, jika produksi dan reproduksi kekerasan menjadi solusi dalam menjawab perbedaan-perbedaan. Permasalahan-persoalan yang terjadi di dunia pendidikan diselesaikan dengan kekerasan maka akan timbul reaksi balik berupa kekerasan yang dilestarikan, sehingga kekerasan dalam pendidikan tidak pernah berhenti.

Secara sosiologis kekerasan dalam dunia pendidikan tidak melekat dalam nalar dan tidak terbangun sebagai konstruksi di negeri ini. Benih-benih kekerasan dan pragmatisme kemungkinan terjadi sebagai fakta makin minimnya ruang-ruang refleksi untuk berinteraksi dalam perbedaan pendekatan pendidikan. Banyak analisis makin minimnya ikatan-ikatan sosial dalam komunitas, serta perubahan sosial yang menyempitkan arena bersama dalam bertukar pikiran dan kian menyusutnya interaksi dalam perbedaan. Dalam situasi seperti ini penyempitan makna perbedaan semakin subur yang diperkuat oleh arogansi dan doktrin sebagai panglima yang tidak memberi ruang dialog dalam perbedaan.

Tantangan besar untuk mengkonstruksi ulang pendidikan anti kekerasan yang mengharapkan perdamaian dalam perbedaan. Tradisi masyarakat untuk berdialog anti kekerasan dalam pendidikan dan tidak saling menutup diri dalam struktur masyarakat yang inklusif sebagai penghubung perbedaan. Dalam masyarakat *grassroot* sebenarnya banyak nilai-nilai, sikap dan tindakan yang cukup cair dan toleran anti kekerasan. Kultur semacam ini harus diangkat dan dipresentasikan dalam berbagai arena perdebatan atas ekpose di berbagai media publik khususnya pendidikan yang berbasis masyarakat yang humanis. Perlu disosialisasikan gerakan *non-violence* dan toleransi untuk kemanusiaan dalam wilayah masyarakat kampus, maka hal ini akan membangun pendidikan anti

kekerasan dalam mewujudkan komunitas kehidupan kampus yang damai (Kedaulatan Rakyat, 13 Agustus 2009; 28).

Kekerasan terjadi disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif, sehingga menimbulkan *depresi*, *stress* yang berat sehingga ada kecenderungan melakukan tindakan tidak terkontrol dan dapat melakukan kekerasan terhadap orang lain maupun diri sendiri. Faktor penyebab *stress* yang menimbulkan kekerasan sangat kompleks, dari masalah ekonomi, harapan yang tidak terwujud, lingkungan yang keras dan kompetitif, kurangnya nilai agama yang diimplementasikan dalam hidup.

Sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan harus diberikan pada mahasiswa, sebagai generasi penerus, kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Pendidikan anti kekerasan bisa disosialisasikan melalui lingkungan keluarga, lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat, dan akan lebih efektif lagi jika melalui peraturan formal, dan para dosen wajib mengintegrasikan dalam mata pelajaran sekaligus memberi keteladanan anti kekerasan. Pemerintah sebagai lembaga formal juga wajib menyensor tayangan TV yang menampilkan gambar-bambar atau cerita yang mengakomodasikan kekerasan.

Pendidikan Anti kekerasan diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi personal dan sosial, pribadi sehingga menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citizen*) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan norma-norma sosial anti kekerasan, membuat aturan hukum yang kondusif untuk kebaikan dan nilai-nilai moral anti kekerasan demi masa depan bangsa yang mengedepankan nilai-nilai anti kekerasan, anti diskriminasi, inklusifisme, humanisme, pluralisme, kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi yang bersumber pada nilai anti kekerasan sebagai paradigmanya..

Diberikannya pendidikan Anti kekerasan pada mahasiswa merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam masyarakat Indonesia. Dengan tersosialisasikan pendidikan anti kekerasan diharapkan generasi penerus dapat memahami, menganalisis, menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang berhubungan dengan kekerasan dan dapat membangun kehidupan anti kekerasan secara berkesinambungan, konsisten yang bersumber pada nilai-nilai moral Pancasila sehingga cita-cita bangsa dapat terwujud perdamaian abadi anti kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mallarangeng, 2000. *Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Forum Komunikasi Keluarga Rokan Hulu.
- Bobbi DePorter & Mike Hernacki, 2003. *Pembelajaran yang menyenangkan*. Jakarta. Gramedia.
- Budi Istanto, 2007. *Pentingnya Pendidikan Bagi Generasi Penerus*. Yogyakarta: FIP. UNY.
- Eomi Toufiqoh, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral*, Yogyakarta: FBS, UNY.
- Ignas Kleden. 2003: *Demokrasi “Demokrasi dan Distorsinya: Politik Reformasi di Indonesia”*. *Google*.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Fakultas Filsafat UGM.
- LAI, 2003, *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Seputar Indonesia, *Pelanggaran Hak Anak Meningkat* , Senin 29 Desember 2008.
- Slamet Suyanto, 2006. *Pendidikan Anak SD*.
- Umar Said, 2007. *Google Pendidikan Moral*
- Verkulyl. J. 1985. *Etika Kristen*, Jakarta. BPK.

### **Sumber Televisi**

- Metro TV, 17 Januari 2009.
- Sandra, TV 7, Senin 6 April 2000, *Tentang Kekerasan dalam Kehidupan Masyarakat*.
- Seputar Indonesia, *Pelanggaran Hak Anak Meningkat* , Senin 29 Desember 2008

### **Surat Kabar**

- A. Safei Maarif, *Kompas*, 7 Maret 2007.
- Haedhar Nashir, "Leptop Dewan". *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 23 Maret 2007.
- Kedaulatan Rakyat* 29 Nov. 2008.
- Kedaulatan Rakyat*, 18 April 2008.
- Sofian, *Kedaulatan Rakyat*, 19 Agustus 2005.
- Victor Purba, "UI Siap Melangkah Lebih Kongkrit", *Kompas*, Jakarta, 23 Maret 2007.

### **Internet**

- Ambarwati, 2007. *Kekerasan*  
*Google, Anti Kekerasan*, 2009
- Yayan Akkhyar, *Anti Kekerasan*. 2008.
- Neneng. *Anti Kekerasan*. 2009.
- Seto Mulyadi, *Anti Kekerasan terhadap Anak*. 2008
- Sumarsih. *Kekerasan*. 2008.

### **Biodata Penulis:**

Sigit Dwi Kusrahmadi, lahir di Yogyakarta, 27 Juni 1957, menyelesaikan S-1 di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UGM, dan menyelesaikan S-2 Sospol Ketahanan Nasional UGM. Sejak tahun 1987 mengajar di MKU dan tahun 2003 pindah di S-1 PGSD FIP UNY.